

PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO BENCANA ALAM DI INDONESIA

Paidi

STIE Dharma Bumiputera, Jakarta

ABSTRACT

The natural disaster such as earthquake, tsunami, volcano eruption, hurricane, flood and landslide may occur to anyone, whenever, and wherever. According to the various sources, in Indonesia 87% are the natural disaster prone regions, or of 440 Urban/Regency territories, 383 out of them are natural disaster prone regions. The objective of this paper is to assist the socialization the understanding of the community in Indonesia on natural disaster is very low. The data or information is obtained from the bibliography of various sources. What should be taken into account are the focus on the preparedness, impact mitigation, emergency response, rehabilitation and recovery as well a reconstruction which can be conducted to minimize the impact, and the affected area will be expectedly recoverable as usual, and even improved mentally, economically, infrastructural and in other social life.

PENDAHULUAN

Bencana alam atau musibah yang menimpa di suatu negara dapat saja datang secara tiba-tiba, sehingga masyarakat yang berada di lokasi musibah bencana, tidak sempat melakukan antisipasi pencegahan terhadap musibah tersebut. Secara geografis wilayah Indonesia terletak di dalam jalur lingkaran bencana gempa (*ring of fire*), dimana jalur sepanjang 1.200 km dari Sabang sampai Papua merupakan batas-batas tiga lempengan besar dunia yaitu : lempengan Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik akan berpotensi memicu berbagai kejadian bencana alam yang besar. Indonesia juga berada pada tiga sistem pegunungan (Alpine Sunda, Circum Pasifik dan Circum Australia). Indonesia memiliki lebih 500 gunung berapi di antaranya 128 statusnya masih aktif, dan merupakan negara kepulauan karena 2/3 dari luas Indonesia adalah laut, memiliki hampir 5.000 sungai besar dan kecil dan 30% diantaranya melintasi wilayah padat penduduk.

Hadi Purnomo & Ronny Sugiantoro (th:hal) menyebutkan bahwa 87% wilayah Indonesia adalah rawan bencana alam, sebanyak 383 kabupaten atau kotamadya merupakan daerah rawan bencana alam dari 440 kabupaten atau kotamadya di seluruh Indonesia. Selain itu kondisi Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan tidak merata, keanekaragaman suku,

agama, adat istiadat, budaya dan golongan menyebabkan Indonesia sangat rawan terhadap bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan angin topan yang sering terjadi di Indonesia tentu berdampak kehancuran, juga menyebabkan penderitaan dan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara.

Dengan seringnya bencana alam yang terjadi di Indonesia, untuk itu diperlukan manajemen risiko bencana (*disaster risk management*) untuk penanganan bantuan terhadap bencana secara lebih baik dan sistematis. Permasalahan yang timbul adalah masih banyaknya warga masyarakat Indonesia yang belum mengetahui dan memahami tentang apa itu bencana, bagaimana cara mengantisipasi dan mengatasi bencana, sehingga risiko yang ditimbulkan akibat bencana tersebut seminimal mungkin, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap bencana tersebut.

Tujuan Penulisan ini adalah membahas tentang penanggulangan dan antisipasi bencana kepada masyarakat perguruan tinggi khususnya dan kepada masyarakat luas pada umumnya. yang dilakukan oleh instansi terkait berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2005 dan UU No. 24 Tahun 2007. Metode yang digunakan adalah studi kasus kepustakaan dan data di analisis secara diskriptif.

PEMBAHASAN

Kondisi Pada Saat Bencana Terjadi

Saat peristiwa bencana alam terjadi gambaran situasinya juga tidak jauh berbeda dengan situasi perang. Kekacauan, kerusakan, kepanikan, korban bergelimpangan, dan orang-orang berteriak, berlarian dan berupaya menyelamatkan diri. Pada kondisi bencana yang terjadinya tidak mendadak, masyarakat masih dapat mempersiapkan diri, namun suasana kegelisahan, kesemrawutan dan kepanikan tetap nampak dengan jelas. Bencana alam yang banyak terjadi di belahan dunia akan menyebabkan banyak kerusakan, kehancuran dan korban jiwa, sehingga perjuangan untuk memberikan bantuan dari para relawan, masyarakat maupun pemerintah tidak pernah berhenti, silih berganti terjadi di mana-mana. Kondisi darurat (*emergency*) yang sangat gawat, bukan hanya menyelamatkan nyawa korban, tetapi juga mempertaruhkan hidup para relawan. Suasana yang mencekam di area bencana merupakan area perjuangan baik bagi para relawan maupun para korban untuk berjauang tetap hidup atau mati.

Manajemen Risiko Bencana

Menurut Syarief dan Kondoatie (2006) mengutip Carter (2001), Manajemen Risiko Bencana adalah pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan melakukan observasi secara sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*), terkait dengan pencegahan (*preventif*), pengurangan (*mitigasi*), persiapan, respon darurat dan pemulihan. Manajemen dalam bantuan bencana merupakan hal-hal yang penting bagi Manajemen puncak yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*directing*), pengorganisasian (*coordinating*) dan pengendalian (*controlling*).

Tujuan dari Manajemen Risiko Bencana di antaranya:

1. Mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan atau masyarakat dan negara.
2. Mengurangi penderitaan korban bencana.
3. Mempercepat pemulihan.
4. Memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

Menurut Agus Rahmat (2006:12) Manajemen Risiko Bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai siklus Manajemen Risiko Bencana yang bertujuan antara lain:

1. Mencegah kehilangan jiwa seseorang
2. Mengurangi penderitaan manusia.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat dan juga kepada pihak yang berwenang mengenai risiko.
4. Mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis lainnya.

Tahapan-tahapan Bantuan Bencana

Tahapan-tahapan atau fase-fase dalam bantuan bencana dikenal dengan istilah siklus penanganan bencana (*disaster management cycle*). Siklus manajemen bencana menggambarkan proses pengelolaan bencana yang pada intinya merupakan tindakan pra bencana, menjelang bencana, saat bencana dan pasca bencana, seperti terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tahapan Bantuan Bencana

Nama Peneliti	Tahapan yang direkomendasikan
Wolenksy (1990)	<ul style="list-style-type: none"> ∅ Sebelum bencana (<i>mitigation and preparedness</i>) ∅ Tanggap darurat (<i>immediate pre and post impact</i>) ∅ Pemulihan jangka dekat (dua tahun) ∅ Pemulihan jangka panjang (sepuluh tahun).
Waugh (2000)	<ul style="list-style-type: none"> ∅ Peringatan (<i>prevention</i>) ∅ Perencanaan dan persiapan (<i>planning and preparedness</i>) ∅ Tanggap (<i>response</i>) ∅ Pemulihan (<i>recovery</i>)
Helsloot and Ruitenber (2004)	<ul style="list-style-type: none"> ∅ Peringatan (<i>Preparedness</i>) ∅ Emergensi (<i>emergency</i>) ∅ Pemulihan (<i>recovery</i>)

Kunci Respons pada setiap tahapan

Memahami setiap tahapan dalam manajemen risiko bencana adalah hal yang sangat penting. Efektifitas manajemen risiko bencana tidak hanya aktivitas pada saat penanganan bantuan bencana saja, namun meliputi seluruh aktivitas seperti dalam model 4 (empat) fase manajemen risiko bencana sebagai berikut:

1. Tahap *preparedness* pemerintah perlu menekankan pada keselamatan jiwa masyarakat di lingkungan wilayah bencana. Praktek manajemen risiko bencana secara terpadu dan komprehensif mutlak diperlukan. Pada sisi

lain, pemahaman bencana pada masyarakat merupakan bagian penting pada fase ini. Dalam hal ini masyarakat perlu memahami response dan tindakan mereka dalam peristiwa bencana tersebut.

2. Tahap *mitigation* manajemen risiko bencana bahwa kegiatan *emergency* memfokuskan pada pengurangan akibat negatif bencana. Kunci response selama masa mitigasi meliputi keputusan tentang pengembangan ekonomi, kebijakan pemanfaatan lahan, perencanaan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum dan identifikasi penemuan sumber daya guna mendukung investasi.

3. Tahap response sangat diperlukan koordinasi yang baik dari berbagai pihak. Koordinasi memungkinkan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana dapat diberikan secara cepat, tepat dan efektif.

4. Tahap *recovery* merupakan fase aktivitas penilaian dan rehabilitasi kehancuran akibat bencana. Pada fase ini ditekankan pada proses pendistribusian bantuan. Proses tersebut meliputi penentuan dan monitoring bantuan pada masyarakat yang terkena bencana.

Peran Berbagai Pihak

Keberhasilan manajemen risiko bencana tidak terlepas dari peran berbagai pihak seperti, relawan, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Governmental Organization (NGO)*, pemerintah bahkan masyarakat dunia internasional. Kerjasama berbagai pihak tersebut akan mempercepat menanggulangi berbagai persoalan bencana dan meminimalkan dampak risiko yang ditimbulkan akibat bencana secara cepat dan efektif, baik secara *shortterm* maupun *longterm* di wilayah yang terkena musibah tersebut.

Keberhasilan Penanggulangan

1. Koordinasi LSM atau NGO dengan para relawan maupun pemerintah dalam skenario penanggulangan pasca bencana melalui kegiatan-kegiatan nyata bergantung kepada orang-orang dan komunitas.
2. Keterlibatan masyarakat merupakan hal yang penting, karena kegiatan komunitas berakar sangat dalam pada masyarakat dan budaya di sebuah wilayah. Mereka dapat menunjukkan kebutuhan dan prioritas yang sesungguhnya atas masalah yang dihadapi, sehingga dapat memberikan respon dan koreksi terhadap rencana

yang akan dilaksanakan dalam menanggulangi bencana.

3. Keberadaan kegiatan komunitas mendorong masyarakat untuk merespon keadaan darurat secara cepat, efisien, fair serta sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan efektif. Munculnya partisipasi masyarakat, dalam grup-grup masyarakat, merupakan bentuk grup *grassroot* yang berperan penting dalam sistem manajemen risiko bencana.

Sistem Manajemen Risiko Bencana di Beberapa Negara

1. Negara-negara Amerika Latin dan Karibia membentuk badan manajemen risiko bencana nasional untuk mengkoordinasikan aktivitas yang dilakukan dalam program kesiapsiagaan, pemulihan, response dan rehabilitasi bencana. Organisasi semacam ini biasanya berada di bawah naungan Departemen Pertahanan atau Departemen Dalam Negeri, atau Departemen yang setaraf dengan kapasitas nasional.

2. Di India, pada tingkat negara bagian Gujarat saja telah memiliki *Gujarat State Disaster Management Policy (GSDMP)* yang dikeluarkan oleh *Gujarat State Disaster Management Authority*. Regulasi ini mengatur secara lengkap prinsip-prinsip penanganan bencana secara lengkap disertai langkah-langkah penanganan sebelum bencana (*pre-disaster phase*), selama bencana (*impact phase*), dan pasca bencana (*post-disaster phase*). Ini baru di tingkat negara bagian, belum di tingkat negara federalnya.

3. Afrika Selatan, republik yang baru sembuh dari diskriminasi rasial selama berpuluh-puluh tahun, juga memiliki kebijakan penanggulangan bencana secara komprehensif yaitu *Disaster Management Act 2002*. Kebijakan ini mengatur hubungan antar lembaga pemerintah (*intergovernmental structures*), hirarki penanganan mulai dari pusat (*national disaster management centre*), tingkat propinsi (*provincial disaster management centre*) hingga sampai tingkat kota/kabupaten (*municipal disaster management centre*).

4. Pemerintah negara bagian Queensland, Australia juga memiliki *Department of Emergency Services*. Departemen ini memiliki *The Disaster Management Act 2003*, dan memiliki struktur hirarki mulai dari *State Government Agencies, District*, hingga *Local Disaster Management Group*

5. Pemerintah Korea Selatan, yang semula memfokuskan *emergency* pada penanggulangan bencana alam.

Oleh karena peristiwa bencana dahsyat yang di alami oleh Korea Selatan pada Tahun 1990 yaitu bencana yang diakibatkan oleh perbuatan manusia, maka isu kebijakan penanggulangan bencana di Korea Selatan di fokuskan pada penanggulangan bencana akibat ulah manusia dari pada bencana alam.

Sistem Manajemen Risiko Bencana di Indonesia

Pemerintah Indonesia secara resmi dan legal menangani pengelolaan bencana dengan membentuk Badan Koordinasi Nasional (Bakornas). Tugas Bakornas adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan serta memberikan standard dan pengarahannya terhadap upaya penanggulangan bencana. Bakornas menangani koordinasi upaya bantuan dan penyelamatan darurat (*emergency relief and rescue*) bekerjasama dengan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial, Menteri Perhubungan, Militer, pemda serta institusi swasta. Manajemen Risiko Bencana di Indonesia pada tingkat nasional ditangani oleh Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS) atau *The National Management Agency*. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) merupakan wadah koordinasi antar departemen di tingkat pusat. Organisasi ini di bentuk berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2005, yang dipimpin oleh Wakil Presiden selaku Ketua, yang berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat propinsi disebut Satuan Koordinasi Pelaksana Pengungsi (Satkorlak PBP). Satkorlak PBP merupakan organisasi di tingkat propinsi yang dipimpin oleh Gubernur, yang bertanggung jawab melakukan penanggulangan bencana di wilayahnya. Adapun tugas utama Satkorlak PBP ini adalah mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bakornas PBP.

Penanganan bencana pada tingkat kabupaten atau kotamadya dilakukan oleh Satuan Pelaksana (Satlak PBP), dan untuk pelaksanaan di lapangan ditangani oleh Satuan Gegana (Satgana PBP). Satuan Pelaksana

Pengungsi (Satkorlak PBP). Satkorlak PBP merupakan organisasi di tingkat propinsi yang dipimpin oleh Gubernur, yang bertanggung jawab melakukan penanggulangan bencana di wilayahnya. Adapun tugas utama Satkorlak PBP ini adalah mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bakornas PBP.

Penanganan bencana pada tingkat kabupaten atau kotamadya dilakukan oleh Satuan Pelaksana (Satlak PBP), dan untuk pelaksanaan di lapangan ditangani oleh Satuan Gegana (Satgana PBP). Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) merupakan organisasi di tingkat Kabupaten / kotamadya yang dipimpin oleh Bupati atau Walikota, yang bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan bencana di wilayahnya dengan tetap memperhatikan kebijakan dan arahan teknis dari Bakornas PB, di samping menyelenggarakan pencatatan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait dan secara periodik melaporkan serta mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Bakornas melalui Satkorlak PBP.

Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan siklus bencana sebagaimana tersebut dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Tahapan Dalam Bantuan Bencana

Kegiatan	Keterangan
Kesiapsiagaan (<i>Preparedness</i>)	Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
Mitigasi (<i>Mitigation</i>)	Serangkaian kegiatan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Tanggap darurat (<i>Response</i>)	Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana
Rehabilitasi/ Pemulihan (<i>Rehabilitation/recovery</i>)	Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

<p>Rekonstruksi (<i>Reconstruc-tion</i>)</p>	<p>Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertibana, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca gempa.</p>
--	---

Lahirnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan pelaksana yang sudah dipersiapkan, diharapkan response terhadap situasi bencana akan menjadi lebih cepat sehingga manajemen risiko bencana menjadi lebih efektif. Pengelolaan manajemen risiko bencana yang efektif memerlukan kombinasi empat konsep, yaitu atas semua bahaya, menyeluruh, terpadu dan kesiapan masyarakat. Pendekatan terpadu pengelolaan bencana secara efektif memerlukan kerjasama aktif dari berbagai pihak terkait. Artinya, semua organisasi dengan tugasnya masing-masing bekerjasama dalam mengelola bencana.

Masyarakat yang terdiri dari masing-masing individu diharapkan selalu waspada terhadap bahaya bencana dan tahu bagaimana cara melindungi dirinya, keluarga rumah, dan harta bendanya dari bahaya bencana. Bila masing-masing dapat melakukan tindakan perlindungan terhadap dampak bahaya bencana, tentu dapat mengurangi ancaman bahaya bencana. Hal yang perlu diperhatikan adalah fokus response pada *aktivitas preparedness, mitigation, response dan recovery* dapat dilakukan dengan baik, sehingga dampak peristiwa bencana akan lebih dapat diminimalkan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bencana alam atau musibah yang menimpa masyarakat dapat datang secara tiba-tiba, sehingga masyarakat yang berada di lokasi musibah bencana, tidak sempat melakukan antisipasi pencegahan terhadap musibah tersebut.
2. 87% wilayah Indonesia adalah rawan bencana alam, atau sebanyak 383 dari 440 kabupaten atau kotamadya merupakan daerah rawan bencana alam .
3. Pemerintah Indonesia secara resmi dan legal menangani pengelolaan bencana dengan membentuk Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) yang bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan,

mengkoordinasikan pelaksanaan serta memberikan standard dan pengarahan terhadap upaya penanggulangan bencana di Indonesia.

4. Penanggulangan Bencana di Indonesia berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam penanganan bencana yaitu, Kesiapsiagaan (*Preparedness*), Mitigasi (*Mitigation*), Tanggap darurat (*Response*), Rehabilitasi / pemulihan (*Rehabilitation / Recovery*), dan Rekonstruksi (*Reconstruction*).
5. Dalam penanganan bencana di Indonesia diperlukan sinergi dan koordinasi dari berbagai pihak misalnya, pemerintah, masyarakat, para relawan dan lembaga swadaya masyarakat bahkan dengan masyarakat internasional.

Saran-saran

1. Pemahaman penanggulangan terhadap bencana alam di Indonesia harus terus menerus dan secara berkesinambungan di sosialisasikan kepada masyarakat.
2. Pemerintah dan atau instansi terkait serta para pemuka masyarakat seyogyanya menciptakan suasana yang kondusif pada saat terjadi bencana seperti sabar, ikhlas, dan tawakal dalam menghadapi bencana alam dan menghindari atau mengurangi kepanikan masyarakat.
3. Menciptakan kegotong-royongan dan bahu membahu pada masyarakat yang terkena bencana alam terutama pada saat pasca terjadinya bencana alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irawan, *Konstruksi dan Reproduksi Sosial atas Bencana Alam*, Fak Pascasarjana Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 2008.
- Abraham, Jonathan, *Disaster Management in Australia: The National Emergency Management System, Emergency Medicine*, 2006.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, Bumi Aksara, 2004
- Departemen Keserhatan RI, *Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana*, 2007.
- Kompas, *Bencana Gempa dan Tsunami*, 2006
- Proyek Sphere, *Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimal Dalam Response Bencana*, Grasindo, Jakarta, 2004
- Purnomo, Hadi & Sugiantoro, Ronny, *Manajemen Bencana*, Media Pressindo, Jakarta, 2010
- Purnomo, Hadi & Utomo, Hargo, *Keefektifan Kerjasama Antar Lembaga Dalam Operasi Pemulihan Bencana , Studi Empiris di Yogyakarta dan Jateng*, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Fak. Ekonomi UGM, Yogyakarta, 2008
- , [Http://www.Google.com](http://www.Google.com)

ANALISIS USAHA *LAUNDRY* SATUAN DENGAN *LAUNDRY* KILOAN “SIMPLE FRESH” DAN “MELIA LAUNDRY” DI JAKARTA

Wijayanti Dewi Prabandari
Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

ABSTRACT

Laundry business could be divided into two, namely laundry kilogram and laundry units. This effort not only helps employees and students to clean their dirty clothes. Laundry activities are very helpful for employees and students living in boarding houses. This study aims to find out where the laundry that has been chosen by consumers and why. The analysis used is the SWOT analysis and descriptive analysis. SWOT Analysis is used to determine the weaknesses and strengths of each of the laundry. The study uses descriptive analysis showed that the majority of respondents chose instead laundry kilogram units. It is important to note that venture laundry business kilogram and laundry units have the same opportunities to develop their business and have a threat that comes from competition and the issues concerning the environment.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, banyak orang disibukkan dengan rutinitas pekerjaan sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian. Para pegawai dan mahasiswa yang tinggal di rumah kos-kosan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan tugas mencuci dan menyetrika, terutama saat musim hujan dimana akan sulit mengeringkan pakaian sehingga pakaian basah akan menimbulkan bau tidak sedap. Kondisi ini oleh sebagian orang dimanfaatkan untuk membuka usaha bisnis *laundry* dan memperoleh penghasilan.

Bisnis *laundry* terbagi dua yaitu *laundry* satuan dan *laundry* kiloan. Maraknya bisnis *laundry* ini ternyata tidak hanya memudahkan pelanggan untuk memperoleh jasa pencucian pakaian yang murah, tetapi juga dapat mendukung kegiatan pariwisata. Para wisatawan yang tinggal untuk waktu lama dan menempati rumah-rumah penginapan yang tidak memiliki jasa *laundry*, membutuhkan jasa *laundry* untuk mencuci dan menyetrika pakaian yang akan dikenakan. Bisnis *laundry* yang saat ini telah banyak dikembangkan tidak hanya terbatas pada kegiatan pencucian pakaian saja tetapi juga tentang pelayanan seperti ketepatan jadwal/waktu jemput dan antar cucian, hasil pencucian yang bersih dan harum, barang yang dicuci tidak rusak, juga kemampuan untuk mengatasi keluhan dari pelanggan.

Penelitian ini merupakan analisis terhadap bisnis *laundry* kiloan dan *laundry* satuan dengan menggunakan analisis SWOT. Metoda yang digunakan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai suatu fenomena atau kejadian dan memberikan gambaran mengenai perbandingan antara *laundry* kiloan dan *laundry* satuan. Objek penelitian ini adalah usaha *laundry* kiloan “*Simply Fresh*” dan *laundry* satuan “*Melia Laundry* dan *Dry Cleaning*” Kedua usaha *laundry* ini memiliki kantor pusat di Yogyakarta dan kantor operasional di Jakarta, dan yang menjadi objek penelitian adalah usaha yang berada di Jakarta. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data sekunder dimana data tersebut telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Mudrajat, 2003). di *Simple Fresh* dan *Melia Laundry* di Jakarta. Sampel adalah karyawan dan mahasiswa yang bertempat tinggal tidak jauh dari kedua lokasi objek penelitian. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *accidental sampling*, dimana responden yang dipilih adalah yang cocok dan sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tinggal di daerah sekitar usaha *laundry* baik *laundry* kiloan (*Simply Fresh*) dan *laundry* satuan (*Melia laundry* dan *dry cleaning*).

2. Berprofesi sebagai mahasiswa dan atau karyawan
3. Menggunakan jasa *laundry*.

Analisis deskriptif dijabarkan mengenai persentase jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik.

PEMBAHASAN

Laundry (Londri)

Menurut David Collins (1995) *laundry* adalah suatu tempat yang mana terdapat pakaian-pakaian dan linen untuk dicuci hingga bersih dan disetrika. Sihite (2000) menyatakan bahwa *laundry* merupakan suatu proses pencucian yang dilakukan terhadap bahan-bahan tekstil dengan menggunakan media utama yaitu air, chemical, dan mesin cuci.

Menurut Sihite (2000) jenis usaha *laundry* ada beberapa macam, di antaranya:

1. *Commercial Laundry*. Suatu badan usaha per-laundry-an yang melayani jasa pelayanan pencucian bahan-bahan pakaian dan bertujuan untuk mencari keuntungan.

2. *Non Commercial Laundry*. Suatu badan usaha per-laundry-an yang melayani jasa pelayanan pencucian bahan-bahan tekstil baik pakaian maupun bahan tekstil lainnya seperti linen dan bertujuan hanya untuk kebutuhan sendiri (*intern*).

3. *Semi Commercial Laundry*. Suatu badan usaha *laundry* yang melayani jasa pelayanan pencucian bahan-bahan tekstil, baik pakaian dari lingkungan sendiri (*seragam*), serta bahan tekstil lainnya seperti linen dan lain-lain. Badan usaha tersebut juga mencuci pakaian orang dari lingkungan luar dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan juga untuk menutupi biaya pencucian diri sendiri.

Seiring perkembangan zaman, usaha bisnis *laundry* berkembang menjadi 2 kategori yaitu: *Laundry Satuan* dan *Laundry Kiloan*. Perbedaan *Laundry Profesional/satuan* dengan *Laundry Kiloan*, perbedaan mendasar antara penyedia jasa *Laundry profesional* dan *laundry kiloan* terletak pada tarif dan penggunaan bahan-bahan penghilang noda.

Laundry Satuan menuntut hasil cucian lebih sempurna dari aspek kebersihan noda, perawatan keawetan serat kain (*long lasting*), dan kenyamanan pakaian setelah pencucian. *Laundry satuan* juga pelayanan ada yang *Laundry* dan *Dry cleaning*, dimana *treatment* pakaian dilakukan satu persatu. *Laundry* ini juga biasa disebut *laundry komersil* atau *laundry profesional*. Ditinjau dari proses-proses penanganan pencuciannya yang mencuci pakaian satu demi satu, maka sudah barang tentu harga dari penggunaan jasa ini jauh lebih mahal di banding jasa *laundry kiloan*. Semakin lengkap mesin dan peralatan yang digunakan oleh *laundry profesional* ini, maka kepuasan konsumen akan semakin tinggi (, 2010).

Laundry kiloan, perhitungan nilai jasa pencucian ini dengan berat per kilogram. Untuk satu kilogram pakaian, seperti kemeja, kisaran jumlahnya antara 8 sampai dengan 12 potong. Mesin-mesin yang digunakan juga relatif berukuran besar, detergen dan bahan kimia yang di gunakan pada umumnya bersifat universal.(, 2010)

Analisis SWOT

Adalah instrumen perencanaan strategis yang klasik. Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan eksternal dan ancaman, instrumen ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini menolong para perencana apa yang bisa dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka. (. 2010).

Analisis SWOT adalah instrumen yang beraneka guna, yang dapat digunakan berkali-kali pada berbagai tahap proyek; membangun sebuah telaah atau untuk pemanasan diskusi sebelum membuat perencanaan. Instrumen ini dapat diterapkan secara luas, atau sub-komponen yang kecil (bagian dari strategi) dapat dipisahkan agar dapat melakukan analisis yang mendetail.

Analisis SWOT terbagi atas empat komponen dasar yaitu:

Strength (**Kekuatan**); situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini.

Weakness (**Kelemahan**); situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini.

Opportunity (**Peluang**); situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

Threat (**Ancaman**); situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

Hasil Analisis SWOT Penelitian

Strength (**Kekuatan/Kelebihan**)

1. *Laundry Kiloan* Simply Fresh laundry

a. Segi Harga dan pelayanan antar jemputnya.; Harga *laundry kiloan* yang hanya berkisar antara Rp. 3.800/Kg

sampai dengan Rp. 7.600/Kg (harga disesuaikan ditiap kota) termasuk di dalamnya adalah pelayanan cuci dan setrika dengan lama proses adalah satu hari, dirasakan sangat membantu bagi kalangan mahasiswa atau karyawan yang tinggal di asrama atau rumah kos. Bukan hanya kalangan mahasiswa dan karyawan saja yang terbantu dengan harga tersebut, para pengusaha penginapan atau motel juga terbantu dengan adanya usaha *laundry* kiloan tersebut.

2. Laundry Satuan

a. Segi penanganan terhadap cucian yang masuk.; dibedakan dari jenis bahan, bahan penghilang noda yang digunakan, perawatan serat kain dan kenyamanan pakaian setelah pencucian.

b. Jenis mesin, perlengkapan dan peralatan yang digunakan jauh lebih lengkap.

c. pelayanan yang diberikan lebih lengkap dan individual, dimana setiap cucian pelanggan diperlakukan secara khusus sesuai dengan permintaan dimana pelayanan yang diberikan termasuk pelayanan *dry cleaning*.

Weakness (Kelemahan)

1. Laundry kiloan

a. Penanganan cucian pelanggan tidak dibedakan berdasarkan jenis kain dan kebutuhan lainnya. Yang dalam waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada pakaian. b. Hasil cuci laundry kiloan tidak terlalu bersih karena pada *laundry* kiloan, seluruh pakaian dicuci tanpa memperhatikan jenis kain dan perawatan yang diperlukan. c. Peralatan yang digunakan.

2. Laundry satuan

a. Segi biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan lebih mahal tinggi. b. Memerlukan modal yang lebih besar karena usaha ini membutuhkan jenis mesin yang memiliki kapasitas baik dan peralatan harus juga lebih banyak.

Opportunity (Peluang)

Usaha laundry di kota-kota besar sangatlah menjanjikan yang dapat terlihat dari kehidupan kota besar dimana banyak orang tidak punya banyak waktu untuk mencuci dan menjemur. Terlebih lagi di kota-kota besar tidak ada lagi tempat lapang untuk menjemur pakaian, sehingga rumah-rumah yang ada di kota besar tidak memiliki tempat untuk menjemur. Masyarakat di kota besar sebagian besar beraktifitas di luar rumah dan tidak memiliki waktu untuk mencuci dan menunggu

cucian sampai kering. Kondisi tersebut merupakan peluang yang sangat baik terutama bagi orang-orang yang memiliki dana lebih dan berada di wilayah yang dekat dengan pusat keramaian seperti perkantoran, kawasan industri, apartemen, tempat kos dan penginapan.

Peluang yang terdapat pada usaha *laundry* terjadi dan dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha baru atau perluasan usaha adalah:

1. Memanfaatkan gaya hidup malas mencuci
2. Adanya perubahan gaya hidup dan tuntutan kesibukan, banyak mahasiswa, karyawan, dan ibu rumah tangga, yang tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian mereka, dan menyerahkannya pada usaha laundry kiloan.
3. Kondisi cuaca saat ini yang mengakibatkan pakaian sering lebih mudah menjadi kotor, bahkan dimusim penghujan, dengan mencuci manual pasti akan sulit menjadi kering, oleh karenanya banyak yang menyerahkan pakaian kotor mereka ke *laundry*
4. *Trend* mencuci di laundry sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.

Threat (Ancaman)

Ancaman yang terdapat usaha *laundry* baik usaha *laundry* kiloan dan usaha laundry satuan adalah:

1. Makin maraknya usaha laundry kiloan maupun usaha laundry satuan, sehingga berdampak pada segi persaingan harga dan pelayanan yang diberikan.
2. Adanya penggunaan bahan-bahan kimia dalam usaha laundry dapat menyebabkan terjadinya polusi pada air dan tanah serta memberikan dampak lingkungan yang tidak sehat.

Perbandingan Usaha Laundry Kiloan dan Laundry Satuan dengan Menggunakan Analisis SWOT

Perbandingan antara usaha *laundry* kiloan dan *laundry* satuan berdasarkan hasil analisis SWOT.

Tabel 1. Perbandingan Usaha Laundry Satuan dan Laundry Kiloan

No	Pembahasan	Laundry	
		Satuan	Kiloan
	Harga	Lebih mahal	Lebih murah
	Proses	Lebih dari 1 hari	1 hari
	Jenis pelayanan	Cuci, setrika, <i>dry cleaning</i>	Cuci dan setrika
	Antar jemput	Tidak ada	Ada
	Modal	Besar	Tidak besar
	Hasil cuci	Bersih	Kurang bersih
	Kerapihan	Rapih (pakaian di kemas satuan)	Rapih (pakaian dikemas berdasarkan pelanggan)

Berdasarkan hasil analisis yang ditampilkan pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa kedua jenis usaha *laundry* tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing usaha tersebut bila ditekuni dapat memberikan hasil sesuai dengan kemampuan individu yang menjalankannya. Meski demikian usaha *laundry* kiloan tetap memiliki keunggulan yang lebih banyak dibandingkan dengan usaha *laundry* satuan terutama dari segi modal dan harga jual. Usaha *laundry* kiloan lebih banyak diminati terutama di daerah-daerah perkotaan terutama di tempat keramaian.

Usaha *laundry* tidak hanya dapat memberikan peluang usaha bagi sebagian orang, tetapi juga dapat membantu sektor pariwisata. Tempat-tempat penginapan dan apartemen yang banyak ditinggali oleh orang asing sangatlah terbantu dengan adanya usaha *laundry*, dimana pihak pengelola tempat penginapan dan apartemen tidak perlu lagi menyediakan *laundry* melainkan melakukan kerjasama dengan usaha *laundry* yang ada di sekitar tempat tersebut. Dengan demikian pihak apartemen maupun pengusaha penginapan tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk membeli peralatan *laundry*.

Analisis Deskriptif

Lokasi tempat usaha *laundry* kiloan dan laundry satuan yang menjadi objek penelitian berada di daerah rumah kos-kosan untuk mahasiswa dan karyawan. Untuk mengetahui laundry mana yang cenderung disukai oleh calon pelanggan, maka penulis menggunakan 30 orang responden sebagai sampel dalam penelitian ini. Hasil jawaban ketiga puluh responden mengenai jenis *laundry* yang dipilih berdasarkan berbagai faktor.

Berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa pada penelitian ini terdapat responden perempuan dengan jumlah 21 orang (70%) dan responden laki-laki dengan jumlah 9 orang (30%). Bila ditampilkan dalam bentuk grafik akan tampak pada gambar di bawah ini.



Gambar 1 Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan pekerjaan para responden diketahui bahwa mayoritas responden memiliki pekerjaan sebagai karyawan dengan jumlah responden sebanyak 17 orang (56.7%) dan memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa sebanyak 13 orang (43.3%).



Gambar 2 Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan jawaban responden diketahui bahwa terdapat 22 orang responden atau sebanyak 73.3% menjawab menggunakan jasa *laundry* kiloan dan 8 orang responden 26.7% menjawab menggunakan jasa *laundry* satuan. Hasil tersebut bila ditampilkan dalam bentuk grafik dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



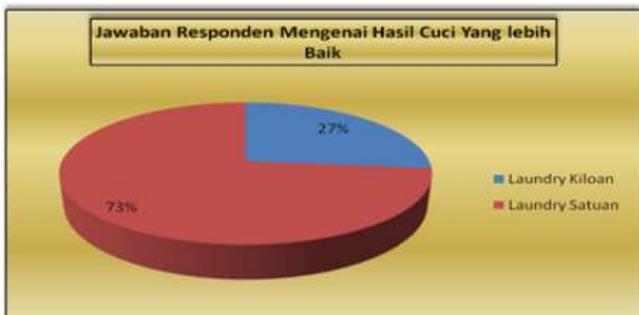
Gambar 3 Grafik Jawaban Responden Mengenai Jenis Laundry Yang dipilih

Jawaban responden mengenai pertanyaan alasan memilih salah satu jenis laundry, sebanyak 17 orang responden (56.7%) menjawab karena harga murah, sebanyak 8 orang responden (26.7%) menjawab hasil cuci bersih dan 5 orang responden (16.7%) menjawab harga murah dan pelayanan cepat. Hasil tersebut bila ditampilkan dalam bentuk grafik akan tampak seperti gambar di bawah ini.



Gambar 4 Grafik Jawaban Responden Mengenai Alasan Memilih Salah Satu Laundry

Saat responden ditanya mengenai laundry mana yang memberi harga murah seluruh responden setuju bahwa laundry kiloan memberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan laundry satuan. Jawaban responden mengenai laundry yang memberikan hasil cuci lebih bersih sebanyak 22 responden (73.3%) menjawab laundry satuan dan sebanyak 8 responden (26.7%) menjawab laundry kiloan. Hasil tersebut bila ditampilkan dalam bentuk grafik akan tampak sebagai berikut.



Gambar 6 Grafik Jawaban Responden Mengenai Laundry Yang Memberikan Hasil Cuci Lebih Baik

Jawaban responden mengenai laundry yang memberikan waktu lebih baik sebanyak 22 orang responden (73.3%) memberikan jawaban laundry kiloan dan sebanyak 8 orang responden (26.7%) memberikan jawaban laundry satuan. Hasilnya bila ditampilkan dalam bentuk grafik akan tampak seperti gambar di bawah ini.



Gambar 7 Grafik Jawaban Responden Mengenai Proses Pelayanan Yang lebih Cepat

Berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat dinyatakan bahwa laundry kiloan lebih dipilih oleh para pelanggan karena memiliki harga yang lebih murah dan pelayanan yang cepat dari laundry satuan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa laundry kiloan lebih dipilih oleh responden karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan laundry kiloan.

PENUTUP Kesimpulan

1. Usaha bisnis laundry kiloan memiliki peluang usaha yang lebih baik dibandingkan dengan laundry satuan. Hal ini dikarenakan usaha laundry kiloan dapat dilakukan tanpa modal yang terlalu besar dan harga jualnya dapat dijangkau oleh kalangan mahasiswa dan karyawan.
2. Kalangan mahasiswa dan karyawan memilih laundry kiloan sebagai jenis laundry yang digunakan karena memiliki kelebihan dari segi harga yang lebih murah dan pelayanan yang lebih cepat.
3. Usaha bisnis laundry juga membantu bidang pariwisata, karena tempat-tempat penginapan yang tidak memiliki laundry sendiri dapat bekerja sama dengan usaha laundry dan memberikan pelayanan laundry kepada para pelanggan.

Saran-saran

1. Sebaiknya usaha bisnis laundry kiloan harus lebih bisa mempromosikan kepada masyarakat lebih gencar lagi
2. Usaha bisnis laundry yang kiloan biarpun memiliki kelebihan lebih murah harganya dibandingkan laundry biasa tetapi hasil produk cucian harus juga menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Ismayanti. *Pengantar Pariwisata*. Grasindo. Jakarta, 2009
 Jatna Supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*. IKAPI. Jakarta, 2008
 James J. Spillane. *Pariwisata Indonesia: Sejarah dan Prospeknya*. Kanisius. Jakarta, 1987
 Oka A Yoety, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Pradnya Paramita. Jakarta, 1997
 Santoso, Singgih, *SPSS, Mengolah Data Statistik secara Profesional*. Cetakan keempat. Elex Media Komputindo. Jakarta, 2002
 Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabet Cetakan kedua, Bandung, 2002
 Sihite Richard, *Laundry and Dry Cleaning*, 2002
<http://121s07.blogspot.com/2010/11/perbedaan-laundry.html>, 2010
<http://www.scribd.com/doc/39790251/BAB-1,2010>
<http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=6&submit,x=20&submit=next&gual=high&submitval=next&name=%2Fjijunkpe%2Fs1%2F2002%2Fjijunkpe-ns-s1-200233497040-315-westin-chapter2pd.2010>